

Daftar Pustaka

A. Buku

- AR, Ridwan, 2006, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Budiardjo Miriam, 2013, *Dasar-dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Deliarnoor Nandang Alamsah, 2020, *Sistem Hukum Indonesia*, Cet. Ke-2, Universitas Terbuka Pers, Tangerang Selatan, 13
- Effendi Perangin, 1991, *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah Dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*, Cet III, Rajawali, Jakarta.
- Farida Indrati Maria, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan. Edisi Revisi*”, Sleman: Penerbit PT Kanisius,
- Ganjong, 2007, *Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- .
- Hakim Abdul, 1998, *Politik Hukum Indonesia*, Jakarta, Yayasan LBHI
- Hardjowidigdo Rooseno, 2004, *Wetgevingsleer di Negeri Belanda dan Perkembangan Undang-Undang saat ini di Indonesia*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Aasi Manusia, hlm. 5.
- Harsono Boedi, 2014, *Hukum Agraria Indonesia*, Jilid I, Usakti, Jakarta
- HR Ridwan, 2014, *Hukum Administrasi Negara Ed. Revisi-11*, Rajawali Pers, Jakarta
- Husein, H.M. Wahyudin dan H. Hufron, 2008, *Hukum, Politik, dan Kepentingan*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta
- Ibrahim Johny, 2005, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Jakarta
- Indrati Maria Farida, 2020, *Ilmu Perundang-Undangan 2: Proses dan Teknik Penyusunan. Edisi Revisi*”, Sleman: Penerbit PT Kanisius.

- Kusumaatmadja Mochtar, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, jilid III, No. 4, (Bandung: Padjadjaran), 1970, hal. 5-16, dalam Satjipto Rahardjo, Hukum dan Perubahan Sosial, (bandung: Penerbit Alumni), 1979, hal. 161.
- Latif, Abdul dan H. Hasbi, 1999, *Politik Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Logemann J.H.A, 1975, *Tentang Teori Suatu Hukum Tata Negara Positif*, Ichtiar Baru- Van Hoeve, Jakarta.
- Manan Bagir, 1994, Politik Perundang-undangan, Makalah, Jakarta.
- Merryman Jhon Henry, Rogelio Perez Perdomo, 2007, *The Civil Law Tradition "An Introduction To The Legal System of Europe and Latin America*, 3rd Edition, Stanford University Press, California
- MD. M. Mahfud, 2001, *Politik Hukum di Indonesia*, Cet. II, LP3ES, Jakarta
- M. Hadjon, Philipus, 1997, *Tentang Wewenang*, Yuridika, Jakarta
- Nazriyah Ni'matul Huda & R, 2011, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia
- Parlindungan, A.P, 1998, *Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria*, CV.Mandar Maju, Bandung.
- Patik, Purwahid, 1994, *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian Dan Dari Undang-Undang)*, CV. Mnadar Maju, Bandung.
- Rahardjo Satjipto, Hukum dan Perubahan Sosial, (bandung: Penerbit Alumni), 1979.
- Santoso, Urip, 1994, *Hak Atas Tanah, Hak Pengelolaan, & Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun*, Kencana, Jakarta.
- Santoso, Urip, 2015, *Perolehan Hak Atas Tanah*, Prenadamedia, Jakarta.
- Sayuna Inche, 2016, "Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau dari Otentisitas Akta Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta
- Sumardjono Maria SW, 2018, *Regulasi Pertanahan & Semangat*

Keadilan Agraria, STPN Press.

Yuliandri, 2011, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik: Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043)

Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630)

Peraturan Pemerintah No. 40 Tahun 1966 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Tahun 1966 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643)

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 1977 tentang Tata Cara Permohonan dan Penyelesaian Pemberian Hak Atas Bagian-Bagian Tanah Hak Pengelolaan serta Pendaftarannya

Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan dan Hak Atas Tanah

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No. 27 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Tahun 2020-2024

C. Karya Ilmiah / Tesis

Nasution, Ali Imran, 2018, "Politik Hukum Kewenangan Pemberhentian Kepala Daerah Di Indonesia". Tesis, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Wulandari, Retno, 2014, "*Kedudukan Instruksi Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Republik Indonesia*", Tesis, Program Magister Kekhususan Kenegaraan Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat.

D. Jurnal

- Nurfaih Irfani, 2020, Asas Lex superior derogat legi inferior: Pemaknaan, Prolematika, Dan Penggunaannya Dalam Penalaran Dan Argumentasi Hukum, dalam Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 16 No. 3, 305-325.
- Fajar Nurhardianto, 2015, “Sistem Hukum dan Posisi Hukum Indonesia”, Jurnal TAPIS, Vol.11, No. 1 Januari – Juni 2015.